

Daftar Pustaka

1. Buku Literatur

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2020.
- Adjie, H., Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Anshori, G., Abdul, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Darus, Hadi, L. M., *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- Djojodirdjo, Moegni, M.A., *Perbuatan Melawan Hukum tanggung gugat (aanprakelijheid) untuk kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- _____, *Perbuatan Melanggar Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Halim, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Harahap, Y., M., *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kie, T., Tan, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Mamudji, S., Soekanto, S., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1985.
- Marzuki, M., Peter, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Muhammad, K., Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Aksara, Jakarta, 2014.

Nieuwenhuis, JH, *Hoofdstuken verbintenisrecht*, terjemahan DJasadin Saragih, Surabaya, 1985.

Patrik, Purwahid, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko Dalam Melawan Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Purba, Orinton, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS Komisaris Dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Simorangkir, O.P., *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984.

_____, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.

Supramono, Gatot, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004.

Widjaya, R., I.G., *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2007.

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan Terbatas jo., Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Jasa bagi Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS tanggal 25 Januari 2016.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/PDT/2016/PT BDG. tanggal 22 Desember 2016.

Putusan Tingkat Kasasi Nomor 1681 K/Pdt/2017 tanggal 16 Agustus 2017.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 188 PK/Pdt/2020 tanggal 1 Juli 2020.

3. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Puspa, P., Yan, *Kamus Hukum Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

4. Tesis, Disertasi, Jurnal, Artikel Ilmiah, dan Majalah

- Arkiang, S., Y., Tri, “Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Keadilan Progresif*, Volume 2, Nomor 2, 2011, Hlm. 196-208.
- Asrori, H., Tanaka, Y., “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Jurnal Repertorium*, Volume IV, 2017, Hlm. 113-120.
- D., H., Lestari, “Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 2, 2013, Hlm. 173-188.
- Mansyur, S., A., Andi, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, No. 2, 2013, Hlm. 1-30.
- Nefi, dkk “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG)”, *Indonesian Notary, Volume 4 No. 1*, 2022, hlm. 490-513.
- Prayogo, Sedyo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. III No. 2, 2016, Hlm. 280-287.
- Sembiring, M.U., “Simulatie (Schjnhandeling – Perbuatan Semu)”, *Makalah yang disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Hukum ke 45 & Program Pendidikan Notaris ke 30*, Medan, 1999, Hlm. 1-18.
- Siswanto, H., Ade, Linawati, “Perjanjian Pendahuluan Atas Jual Beli Saham Yang Merupakan Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Lex Jurnalica*, Volume 17 Nomor 3, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2020, Hlm. 290-301.
- Sudrajat, Tedi, “Implikasi Hukum Pembatasan Peran Serta Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Politik Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2011, Hlm. 414-423.
- Yudho, A., Wibisono, “Perbuatan Melanggar Hukum Sebagai Sumber Utang Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Rechstidee*, Vol. 12, No. 2, 2017, Hlm. 209-222.
- Yusa, I., Gede, dkk, “Akibat Hukum Akta Perjanjian Nominee terhadap Pihak Ketiga”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, 2016, Hlm. 141-152.

5. Internet

Anonim, “*Apa itu Akibat Hukum?*”, media di website <http://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

Anonim, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*”, media di website <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 31 Juli 2023.

